



Dinkes Yogya Wajibkan Dapur MBG Lengkapi Syarat SLHS

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak mau kecolongan, Dinas Kesehatan (Dinkes) kini memaksa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah ini merupakan upaya Pemkot Yogyakarta untuk memastikan higienitas dan keamanan pangan, sejalan dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mensyaratkan SLHS untuk dapur MBG.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menjelaskan, sertifikasi ini krusial untuk menjamin proses pengolahan pangan sesuai standar operasional prosedur. "Kami mendorong mereka (SPPG) untuk melengkapi persyaratan SLHS, di antaranya ada uji lab," tandasnya, Selasa (11/11).

Lana menegaskan, proses ini bukan sekadar formalitas administratif. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus melalui serangkaian uji laboratorium ketat. Permohonan yang dapat diajukan via aplikasi terpadu *Jogja Smart Servi-*

ce (JSS) tersebut, dirancang detail untuk menutup celah kontaminasi pangan.

Persyaratannya meliputi nomor induk berusaha dari OSS, surat penunjukan penanggung jawab, sertifikat pelatihan hygiene sanitasi atau keamanan pangan siap saji penanggung jawab, dan penjamah makanan, serta gambar tata letak sarana produksi.

Selain itu surat keterangan sehat seluruh karyawan, pemeriksaan kualitas air parameter biologi E.Coli, hasil pemeriksaan sampel makanan seperti nasi sayur, lauk parameter biologi E.Coli dan parameter kimia seperti formalin, boraks, rhodamin B dan methanil yellow.

Termasuk hasil pemeriksaan usap alat peralatan makanan seperti piring, mangkok, gelas, garpu, talenan dan pisau dengan parameter biologi E.Coli, serta hasil pemeriksaan rectal swab bagi penjamah makanan dengan parameter Salmonella sp, Shigella sp, Vibrio cholera dan E.Coli pathogen.

"Permohonan SLHS yang masuk selanjutnya dilakukan verifikasi berkas dan peninjauan ke lokasi oleh tim untuk ceklist pemenuhan persyaratan," ujar Lana.

"Jika memenuhi syarat, SLHS diterbitkan. Jika belum memenuhi syarat, dilakukan

tindak lanjut perbaikan dulu sebelum SLHS diterbitkan," tambahnya.

Meski pengurusan SLHS gratis dan ditargetkan selesai dalam 8 hari kerja, ia mengakui, belum semua SPPG di Kota Yogyakarta mengantonginya, karena masih dalam proses melengkapi persyaratan.

Di samping itu, Dinkes juga telah berinisiatif menggelar pelatihan keamanan pangan bagi 14 SPPG yang sejauh ini sudah berjalan di wilayahnya. "Untuk calon SPPG yang belum beroperasi diharapkan segera mengurus dan melengkapi persyaratan sertifikasi SLHS, sebelum operasional dimulai," urai Lana.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merespons data yang menunjukkan mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Alih-alih mempercepat, kepanjangan tangan pemerintah pusat itu justru meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk menjaga ketat proses penerbitan sertifikat. Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, per Oktober 2025 baru 16 dari total 168 SPPG, atau sekira 10 persen, yang telah mengantongi sertifikat tersebut. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005